

**PENGARUH *SURPLUS FREE CASH FLOW* DAN
MEKANISME *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN
LABA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

S. WILLY RAHADYAN W.
NIM. 12030111140234

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : S. Willy Rahadyan W.

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140234

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *SURPLUS FREE CASH FLOW* DAN MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA**

Dosen Pembimbing : Dr. Agus Purwanto, SE., M.Si., Akt.

Semarang,
Dosen Pembimbing,

(Dr. Agus Purwanto, SE., M.Si., Akt.)
NIP. 196808271992021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : S. Willy Rahadyan W.
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140234
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH *SURPLUS FREE CASH FLOW*
DAN MEKANISME *GOOD CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN
LABA**

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 24 Maret 2015

Tim Penguji:

1. Dr. Agus Purwanto, SE., M.Si., Akt. (.....)
2. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt. (.....)
3. Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo, M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, S. Willy Rahadyan W., menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Pengaruh *Surplus Free Cash Flow* Dan Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang,

Yang membuat pernyataan,

(S. Willy Rahadyan W.)

NIM 12030111140234

ABSTRACT

The aim of this research is to investigate the influence of surplus free cash flow and good corporate governance mechanisms to earning management. Good corporate governance mechanisms that used in this research, such as : board of commissioner size, board of commissioner independent, audit committee size, the frequency of audit committee meetings, and the number of finance experts audit committee.

The sample in this research are manufacturing companies which were listed in Indonesia Stock Exchange.in the year of 2012-2013. Total sample in this research are 139 companies that selected with purposive sampling method. This research uses multiple regression analysis method to investigate the influence of surplus free cash flow and good corporate governance mechanisms to earning management.

The results of this research indicate that surplus free cash flow had a positive significant influence to earning management, board size had a negative significant influence to earning management. Board of commissioner independent, audit committee size, the frequency of audit committee meetings, and the number of finance experts audit committee had not a significant influence to earning management.

Keyword : Earning management, surplus free cash flow, good corporate governance mechanisms.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh *surplus free cash flow* dan mekanisme *good corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Mekanisme *good corporate governance* yang digunakan pada penelitian ini antara lain : ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, jumlah *finance experts* komite audit.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012–2013. Total sampel penelitian adalah 139 perusahaan yang ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji pengaruh *surplus free cash flow* dan mekanisme *good corporate governance* terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *surplus free cash flow* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Variabel dewan komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan jumlah *finance experts* komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kata kunci : Manajemen laba, *surplus free cash flow*, mekanisme *good corporate governance*.

-MOTTO-

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu" **-Matius**, **7:7-**

"Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya", **-Yoh 14:16-**

"Jangan takut untuk mengambil suatu langkah besar bila memang itu diperlukan. Kalian takkan bisa meloncati sebuah jurang dengan dua lompatan kecil"

"Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri" **-Martin Vanbee-**

-PERSEMBAHAN-

Kupersembahkan karya ini untuk Papa, Mama, Adik, Nenek, dan keluarga besar tercinta, anak-anak Dayu's Management dan sahabat-sahabat yang sangat aku kasihi, orang-orang disekitar yang senantiasa memberi doa, semangat, dan kasih sayang yang selalu menemani di setiap detik dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena selalu senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PENGARUH *SURPLUS FREE CASH FLOW* DAN MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA”**, dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari banyak hambatan-hambatan yang ada, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu terciptanya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. H. Rahardja, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali. Terima kasih atas bimbingan dan waktu yang telah diberikan selama perwaliannya.
3. Bapak Dr. Agus Purwanto, SE., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala pengarahan dan koreksi yang diberikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si, Akt., selaku ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas dedikasinya untuk kemajuan fakultas tercinta.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan perkuliahan di Universitas Diponegoro.
6. Petugas perpustakaan UNDIP yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

7. Bagian tata usaha dan ruang data. Terima kasih atas bantuannya dalam semua proses yang diperlukan.
8. Keluarga yang selalu aku cintai Papa, Mama, Dea, Davin, Nenek, dan Selly terima kasih atas kasih sayang dan semangat yang tidak henti-hentinya kalian curahkan selama pembuatan skripsi.
9. Elen Ashari "*My Special One*, yang tidak bosan-bosannya memberi nasehat dan semangat selama membuat skripsi.
10. Anak bimbingan seperjuangan Pak Agus Purwanto. Dila, Bunda, Ulian, Risha, Gati yang selalu memberi bantuan setiap kali bimbingan.
11. Dayu's Management. Mbak Dayu, Nonik, Nenek, Ega, Dila, Nia, Vanes, Herdian dan Gati yang berjuang bersama untuk lulus bersama.
12. Teman-Teman Denok kenang terima kasih atas pacuan semangatnya selama pembuatan skripsi.
13. Teman-Teman KKN Samiraners yang bisa memberikan keceriaan ketika pembuatan skripsi.
14. Teman-teman satu perjuangan semester awal Herdian, Gati, Wisnu dan lainnya.
15. Teman-teman akuntansi 2011. Terima kasih telah menjadi bagian hidup penulis dengan tawa, tangis, dan senyumnya.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Skripsi ini adalah hasil terbaik yang telah diberikan oleh penulis. Jika masih ada kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, guna perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membacanya.

Semarang, 24 Maret 2015
Penulis,

S. Willy Rahadyan W.
NIM 12030111140234

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II TELAAH PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	17
2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)	17
2.1.2 Manajemen Laba (<i>Earning Management</i>)	19
2.1.3 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	24
2.1.4 <i>Surplus Free Cash Flow</i>	30

2.1.5 Ukuran Dewan Komisaris	31
2.1.6 Dewan Komisaris Independen	32
2.1.7 Ukuran Komite Audit	34
2.1.8 Frekuensi Rapat Komite Audit	35
2.1.9 Jumlah <i>Finance Expert</i> Komite Audit	36
2.2 Penelitian Terdahulu	37
2.3 Kerangka Penelitian	42
2.4 Hipotesis	46
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	53
3.1.1 Variabel Dependen.....	54
3.1.1.1 Manajemen Laba (<i>Earning Management</i>)	54
3.1.2 Variabel Independen	56
3.1.2.1 <i>Surplus Free Cash Flow</i>	56
3.1.2.2 Ukuran Dewan Komisaris	59
3.1.2.3 Dewan Komisaris Independen	59
3.1.2.4 Ukuran Komite Audit	60
3.1.2.5 Jumlah Rapat Komite Audit	60
3.1.2.6 Jumlah <i>Finance Experts</i> Komite Audit	60
3.2 Populasi dan Sampel	62
3.3 Jenis dan Sumber Data	62
3.4 Metode Pengumpulan Data	63
3.5 Metode Analisis	63
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	63
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	64
3.5.2.1 Uji Normalitas	64

3.5.2.2 Uji Heteroskedasitas	65
3.5.2.3 Uji Multikolonieritas.....	66
3.5.2.4 Uji Autokorelasi.....	66
3.5.3 Regresi Berganda (<i>Multiple Regression</i>)	67
3.5.4 Uji Hipotesis	68
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	68
3.5.4.2 Uji F	68
3.5.4.3 Uji T	69
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	70
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	70
4.2 Statistik Deskriptif	71
4.3 Analisis Data.....	75
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	75
4.3.1.1 Uji Normalitas.....	75
4.3.1.2 Uji Heteroskedastisitas.....	79
4.3.1.3 Uji Multikolinieritas	81
4.3.1.4 Uji Autokorelasi	82
4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	83
4.3.3 Uji Hipotesis	86
4.3.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	86
4.3.3.2 Uji F	87
4.3.3.3 Uji T	87
4.4 Pembahasan	90
BAB V PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	98

5.3 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2 : Ringkasan Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 : Ringkasan Variabel Penelitian	60
Tabel 4.1 : Perolehan Sampel Perusahaan.....	71
Tabel 4.2.1 : Deskripsi Variabel Penelitian	72
Tabel 4.2.2 : Deskripsi Variabel Independen	74
Tabel 4.3.1.1.1 : <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	76
Tabel 4.3.1.1.2 : <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	78
Tabel 4.3.1.2 : Uji Heteroskadasitas Model Regresi	79
Tabel 4.3.1.3 : Uji Multikolinieritas	81
Tabel 4.3.1.4 : Uji Autokorelasi Model Regresi	82
Tabel 4.3.2 : Model Regresi Berganda	83
Tabel 4.3.3.1 : Koefisien Determinasi Model Regresi	86
Tabel 4.3.3.2 : Uji F Model Regresi	87
Tabel 4.3.3.3 : Uji T Model Regresi	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 4.3.1.1.1 : Grafik Normal P-P Plot awal	76
Gambar 4.3.1.1.2 : Grafik Normal P-P Plot setelah diobati.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A : Hasil Pengolahan Data SPSS.....	103
LAMPIRAN B : Data Sampel Perusahaan.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas alasan yang menjadi latar belakang masalah mengenai sebab-sebab dilakukannya penelitian tentang arus kas bebas, mekanisme *good corporate governance* yang dihubungkan dengan praktik manajemen laba pada perusahaan di Indonesia. Latar belakang tersebut menjadi landasan rumusan penelitian yang akan menjadi fokus penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang akan diuraikan pada bab ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari kebanyakan perusahaan pada zaman yang sudah berkembang ini adalah mendapatkan laba jangka panjang dan pengembangan usaha. Disamping itu, perusahaan harus mampu menciptakan nilai bagi pemiliknya seiring dengan perkembangan waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi (Utomo, 2009). Hal ini menjadi tantangan terutama bagi manajemen perusahaan tersebut untuk bisa menciptakan nilai dan manfaat bagi pemiliknya, agar perusahaan tersebut bisa lebih berkembang lebih baik dalam hal keuangan perusahaan.

Di zaman yang sudah memasuki era globalisasi, laporan keuangan menjadi salah satu sumber informasi yang cukup untuk menggambarkan tentang keadaan dan kinerja suatu perusahaan. Informasi tersebut menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan selama periode yang

bersangkutan serta perubahan posisi keuangan yang terjadi selama periode tersebut.

Laporan keuangan merupakan salah satu media bagi manajemen perusahaan untuk membuktikan kinerjanya. Hal ini disebabkan karena informasi yang ada pada laporan keuangan tersebut selanjutnya diserahkan kepada pemangku kepentingan perusahaan yang selanjutnya akan digunakan untuk menunjukkan keefektifan pencapaian tujuan dan untuk melaksanakan fungsi pertanggungjawaban dalam perusahaan. Informasi tersebut menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, dan bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Agustia, 2013)

Salah satu hal penting dalam laporan keuangan yang harus diperhatikan oleh manajemen adalah laba. Hal ini disebabkan karena informasi laba yang dimiliki perusahaan maka kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dan kemudian dinilai. Informasi laba pada suatu perusahaan merupakan elemen yang digunakan pihak pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja manajemen suatu perusahaan. *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC)* nomor 1 menyebutkan bahwa informasi laba merupakan faktor penting dalam menaksir kinerja atau pertanggung jawaban manajemen dan informasi laba tersebut membantu pemilik atau pihak lain melakukan penaksiran atas kemampuan laba perusahaan di masa yang akan datang.

Sesuai dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa antara *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda. Di sisi *agent*, *agent* berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya untuk kepentingannya sendiri, di sisi lain *principal* memiliki kepentingan untuk mengembangkan perusahaan yang dimiliki. Tetapi di dalam hal ini, *agent* lebih diuntungkan karena *agent* memiliki informasi yang lebih lengkap dari pada *principal*, karena keuntungan ini manajemen (*agent*) memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mengendalikan perusahaan. Di situasi inilah manajemen dapat melakukan praktik manajemen laba untuk kepentingan diri sendiri

Praktik manajemen laba yang terjadi di dunia mengakibatkan kerugian bagi pemakai laporan keuangan. Sekitar satu dekade yang lalu, terjadi skandal kasus Enron, yang ikut melibatkan KAP Andersen sebagai auditor dalam kasus ini, yang melakukan manipulasi data akuntansi, yang menyebabkan runtuhnya perusahaan raksasa dunia tersebut. Keruntuhan Enron disebabkan karena terjadinya penurunan nilai *rating* investasi perusahaan disebabkan hutangnya yang terlalu besar, yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca.

Kasus manajemen laba juga terjadi pada perusahaan di Indonesia antara lain PT. Kimia Farma Tbk. yang juga melakukan manipulasi data akuntansi. Kasus yang terjadi pada tahun 2002 ini melibatkan manajemen PT. Kimia Farma Tbk. sebagai pelaku manajemen laba. Kasus ini hampir

mirip dengan kasus yang dialami Enron, hanya PT. Kimia Farma ini tidak melibatkan KAP yang mengaudit. KAP yang mengaudit laporan keuangan PT. Kimia Farma telah menjalankan standar audit yang berlaku, namun tidak mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi. (Bapepam, 2002)

Berdasarkan pemeriksaan Bapepam dalam laporan tahunan tahun 2002 terdapat kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan pencatatan penjualan yang menyebabkan *profit overstead* laba bersih sebesar Rp 32,7 miliar. Selain kasus PT. Kimia Farma ini juga terdapat kasus pada PT. Indofarma yang terjadi pada tahun 2004. Bapepam menemukan bukti bahwa nilai barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya yakni sebesar Rp 28,87 miliar (Bapepam, 2004).

Praktik manajemen laba sangat umum di dunia perusahaan sebagai akibat dari masalah keagenan yang serius (Healy dan Wahlen, 1999). Karena tidak dapat dipungkiri bahwa antara manajemen dan pemilik modal memiliki tujuan yang berbeda. Manajemen berorientasi pada kinerjanya yang dicerminkan dari laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, sementara pemilik modal lebih berorientasi akan perkembangan perusahaannya kedepan.

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam proses menyusun pelaporan keuangan sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya (Scott, 1997). Hal tersebut dilakukan oleh manajer untuk menyajikan gambaran

keuangan yang lebih menguntungkan dari kinerja perusahaan melalui akrual diskresioner (Iskandar dan Teruya, 2006).

Laba penipuan berkaitan dengan kecurangan pelaporan keuangan yang melibatkan salah saji disengaja atau kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan (Bukit dan Iskandar, 2009). Karena disini manajemen selaku penggerak perusahaan dapat menggunakan prinsip akuntansi yang fleksibel untuk mengelola laba sesuai dengan kebutuhannya. Akibat dari praktik ini maka muncul asimetri informasi (perbedaan informasi) yang akan menyebabkan kekeliruan informasi keuangan sebagai akibat dari konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Jika asimetri informasi ini terus terjadi, maka perusahaan akan mengalami penurunan performa karena keputusan yang diambil akan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Namun perilaku oportunistik manajer yang menimbulkan asimetri informasi ini dapat diminimalisasi dengan mekanisme pemantauan tata kelola perusahaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Good corporate governance merupakan mekanisme yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan perilaku pihak manajemen. Beberapa mekanisme *good corporate governance* meliputi keberadaan komisaris independen, keberadaan komite audit, tidak terdapatnya CEO *duality*, dan lain sebagainya. Penerapan prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari

independensi, transparansi, pengungkapan, akuntabilitas dan tanggung jawab dan kewajaran menjadi fokus utama dalam melakukan tata kelola perusahaan. (KNKG, 2006)

Banyak faktor yang menyebabkan praktik manajemen laba. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya praktik manajemen laba adalah nilai arus kas bebas suatu perusahaan. Len dan Poulsen (1989) merupakan salah satu pelopor yang memperkenalkan teori arus kas bebas. Dalam pandangannya, arus kas bebas didefinisikan sebagai kas dari aktivitas operasi setelah dikurangi dengan kas untuk kebutuhan investasi proyek yang bernilai positif (Bhundia, 2012). Menurut (Lehn dan Poulsen, 1989) arus kas bebas adalah laba operasi sebelum beban penyusutan, beban bunga dan deviden dari pemegang saham.

Keadaan arus kas bebas yang lebih membuat kesempatan perusahaan untuk melakukan manajemen laba akan lebih tinggi. Manajer pada perusahaan yang memiliki masalah dengan arus kas bebas cenderung menyalahgunakan wewenang dalam menggunakan aliran kas bebas, yaitu dengan menginvestasikan aliran kas bebas pada proyek yang tidak menguntungkan atau proyek yang terlalu berisiko yang dapat merugikan perusahaan (Rahman A. F., 2009).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bukit dan Iskandar, (2009) yang meneliti hubungan antara *surplus free cash flow* terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian menemukan bahwa manajemen laba terjadi pada perusahaan yang mempunyai *surplus free cash flow* yang

tinggi. Manajer cenderung menggunakan kebijakan untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Chung *et al.* (2005) menunjukkan bahwa perusahaan dengan *surplus free cash flow* akan menghadapi masalah agensi serupa. Manajemen dari perusahaan-perusahaan ini bertindak oportunis untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan cenderung untuk terlibat dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan, lebih dari investasi dan menyalahgunakan dana (Bukit dan Iskandar, 2009). Mereka cenderung melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan guna memaksimalkan kepentingannya sendiri.

Jensen (1986) juga menyatakan bahwa manajemen lebih suka menginvestasikan arus kas bebas perusahaan ke dalam proyek baru mereka daripada membagikan kepada pemegang saham (melalui dividen atau pembelian kembali saham). Hal ini karena pembagian aliran kas bebas kepada pemegang saham akan mengurangi sumber daya yang berada di bawah kendali manajemen (Rahman A. F., 2009). Tujuan manajemen menginvestasikan aliran kas bebas ke dalam proyek baru ialah untuk membangun kerajaan bisnis dan memperbesar ukuran perusahaan, meskipun investasi tersebut bisa merugikan dan mengurangi nilai perusahaan (Stein, 2003). Selain itu, motivasi manajemen melakukan pembangunan kerajaan bisnis ialah untuk memperoleh keuntungan pribadi baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial (Jensen, 1986).

Di Indonesia, telah diciptakan peraturan dalam melakukan pengelolaan yang baik bagi perusahaan. Salah satu tujuannya untuk mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Mekanisme *good corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007). Salah satu cara adalah dengan melakukan pengendalian melalui banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada di suatu perusahaan.

Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan pelaporan keuangan dengan kualitas yang baik (Hari, 2012). Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Proses *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris diharapkan dapat mengurangi kecenderungan manajer dalam melakukan tindakan manajemen laba agar investor tetap memberikan kepercayaan untuk menanamkan investasinya pada perusahaan. Oleh karena itu dengan jumlah yang optimal dari anggota dewan komisaris diyakini dapat melakukan fungsi pengawasan yang lebih efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prastiti dan Meiranto (2013) jumlah dewan komisaris yang ada di perusahaan berpengaruh

secara negatif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba, dengan kata lain semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka praktik manajemen laba di perusahaan tersebut akan semakin berkurang. Sebaliknya, (Rahman dan Ali, 2006) berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dengan manajemen laba. Selanjutnya menurut Sukeecheep *et al.* (2013) berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh pada manajemen laba. Dengan kata lain masih banyak *research gap* yang terjadi dalam penelitian ini.

Selain dari sisi jumlah anggota komisaris yang ada di perusahaan untuk menekan jumlah praktik dari manajemen laba, dalam mencapai tujuan tata kelola perusahaan yang baik, hendaknya memperhatikan komposisi antara dewan komisaris perusahaan dengan dewan komisaris eksternal yang bersifat independen yang ada di suatu perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No : KEP-643/BL/2012 dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik karena dalam mencapai tujuan pengelolaan perusahaan yang baik, dewan komisaris eksternal didatangkan untuk melakukan pengawasan dan melindungi kepentingan pemegang saham. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk memiliki peran yang efektif, dewan komisaris harus terdiri dari sejumlah besar komisaris independen. Menurut Vafeas (2000), komisaris eksternal memegang peran yang lebih efektif dalam pengawasan perilaku manajer puncak yang agresif dibandingkan dengan orang dalam.

Dalam mekanisme *good corporate governance*, komite audit merupakan salah satu bagian penting. Komite audit berfungsi untuk membantu mengendalikan dan memonitor manajemen. Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris agar prinsip-prinsip *good corporate governance* di suatu perusahaan. Di Indonesia terdapat keputusan yang mengatur tentang pembentukan komite audit di perusahaan yakni terdapat pada Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No : KEP-643/BL/2012 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Alves (dalam Putri, 2014), berpendapat bahwa fungsi audit merupakan fungsi yang penting di perusahaan karena berfungsi untuk mengidentifikasi kepentingan antara manajer dengan investor secara lebih dekat.

Di dalam perusahaan terdapat sejumlah orang yang menjabat sebagai komite audit perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No : KEP-643/BL/2012, struktur keanggotaan komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Di dalam penelitian yang dilakukan Lin *et al.* (2009) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba yang berarti semakin besar jumlah anggota komite audit, maka akan semakin besar praktik manajemen laba di suatu

perusahaan. Hal ini sangat bertentangan dengan penelitian Saleh *et al.* (2007) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba.

Selain dari faktor jumlah anggota komite audit di dalam suatu perusahaan, frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit perusahaan juga menentukan besarnya praktik manajemen laba di suatu perusahaan. Iskandar dan Rahmat (2007) menyatakan bahwa semakin aktif komite audit dalam mengadakan pertemuan, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif menurunkan praktik manajemen laba.

Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No : KEP-643/BL/2012 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota frekuensi rapat anggota komite audit ini dapat mempengaruhi besarnya praktik manajemen laba. Saleh *et al.* (2007) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Selain itu Xie *et al.* (2003) juga menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit memperkecil praktik manajemen laba.

Faktor keahlian keuangan (*finance experts*) seorang auditor juga menjadi bagian penting dalam melakukan pengawasan kepada pihak manajemen perusahaan dalam mencegah praktik manajemen laba. *The*

Blue Ribbon Panel yang membahas tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman seorang komite audit meyarankan bahwa sebaiknya komite audit memiliki latar belakang dalam keahlian finansial (Saleh *et al.* 2007).

Di Indonesia, keahlian dan pengalaman seorang komite audit juga sudah diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No : KEP-643/BL/2012 yang menyatakan bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saleh *et al.* (2007) menyatakan bahwa pengetahuan anggota komite audit tentang keuangan (*finance experts*) berpengaruh negatif pada manajemen laba. Atau dengan kata lain, dengan semakin banyak jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan akan menurunkan praktik dari manajemen laba.

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan ingin meneliti apakah variabel *surplus free cash flow* dan mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari komite audit, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan *finance experts* komite audit masih memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba terutama pada saat ini. Selain itu, perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah yakni pada penambahan variabel *surplus free cash flow* oleh peneliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, itu dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *surplus free cash flow* mempengaruhi manajemen laba?
2. Apakah ukuran dewan komisaris mempengaruhi manajemen laba?
3. Apakah dewan komisaris independen mempengaruhi manajemen laba?
4. Apakah ukuran komite audit mempengaruhi manajemen laba?
5. Apakah frekuensi rapat komite audit mempengaruhi manajemen laba?
6. Apakah jumlah *finance expert* komite audit mempengaruhi manajemen laba?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh variabel *surplus free cash flow* berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

3. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh variabel jumlah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
5. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh variabel frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
6. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh variabel jumlah *finance experts* komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi investor

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi pada saham-saham yang diinvestasikannya, yaitu dengan menganalisis informasi yang tersedia yang menjerumuskan para pengguna laporan keuangan bagi keuntungan pihak manajemen melalui praktek manajemen laba sehingga investor dapat memperoleh return yang optimal atas investasi yang dilakukan.

2. Bagi emiten

Hasil dari penelitian ini bagi emiten yakni, agar emiten dapat lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan penyelenggaraan manajemen perusahaan terkait praktik-praktik manajemen laba yang diterapkan di perusahaan. Karena praktik ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan investor terhadap laporan keuangan yang dihasilkan emiten karena proses manajemen laba.

3. Bagi dunia akademik

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai adanya praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan landasan dan informasi tambahan bagi penelitian – penelitian selanjutnya.

4. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang pasar modal dan manajemen laba pada perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi dalam tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu. Kemudian dari landasan teori dan penelitian terdahulu dapat terbentuk hipotesis dan kerangka penelitian yang melandasi penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian tentang komposisi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV :HASIL DAN ANALISIS

Di dalam bab ini diuraikan deksripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil serta dijelaskan pula argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai : (i) Teori agensi yang menjadi landasan teori penelitian ini, dan teori-teori mengenai manajemen laba, *surplus free cash flow*, serta mekanisme dari *good corporate governance* dan juga penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (ii) kerangka pemikiran penelitian, dan (iii) pengembangan hipotesis yang akan diuraikan dalam bab ini.

2.1 Landasan Teori

Penelitian ini berdasar pada teori agensi. Teori agensi menyatakan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Salah satu cara untuk mengurangi konflik keagenan tersebut adalah dengan *good corporate governance*. Selain itu pada bagian ini akan dijelaskan teori mengenai variabel-variabel yang akan digunakan pada penelitian ini.

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan muncul ketika *principal* tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri, sehingga harus menjalin kontrak dengan *agent* untuk menjalankan perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori yang menjelaskan tentang konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* sering disebut teori keagenan (*agency theory*).

Masalah agensi adalah masalah yang timbul karena konflik kepentingan antara agent dan principal. Konflik kepentingan antara *agent*

dan *principal* sering terjadi di suatu perusahaan. Masalah keagenan ini menjadi lebih jelas jika antara manajemen dan pemegang saham saling memaksimalkan kepentingan mereka (Jensen dan Meckling, 1976). *Agent* memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan *principal*, dimana agent lebih bersifat *risk taker* dalam pengambilan keputusannya dan principal lebih bersifat *risk averse*.

Eisenhardt dalam Agustia (2013) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Tiga hal tersebut yang menimbulkan sifat oportunis yang kemudian akan menimbulkan konflik keagenan.

Bukit dan Iskandar (2009) menyatakan salah satu penyebab muncul konflik keagenan yang akan menyebabkan timbulnya agency cost adalah *surplus free cash flow*. Hal ini terjadi karena ada perbedaan kepentingan antara principal dan manajer. Manajer berkeinginan arus kas bebas digunakan untuk memperbesar perusahaan melebihi ukuran optimalnya walaupun itu berdampak buruk bagi perusahaan sementara prinsipal menginginkan sisa dana tersebut untuk dibagikan guna meningkatkan kesejahteraannya, dan untuk menutupi tindakan buruknya itu manajer cenderung melakukan manajemen laba.

Praktik manajemen laba bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak pemangku kepentingan akan perilaku dari manajemen. Sehingga manajer dapat melakukan manipulasi laba sesuai dengan kebutuhannya guna mencapai tujuan tertentu. Kemungkinan terjadinya konflik antara pemegang saham dengan manajer dapat dikurangi dengan penegakkan mekanisme *good corporate governance* seperti melakukan pengawasan melalui dewan komisaris dan komite audit. Diharapkan peran dari organ-organ tersebut dapat tercipta *good corporate governance* di perusahaan.

2.1.2 Manajemen Laba (*Earning Management*)

Manajemen laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan akrual dalam menyusun laporan keuangan (Scott, 2003). Dalam berbagai penelitian pengukuran *discretionary accrual* atau *abnormal accrual* diukur untuk mendeteksi pola perilaku *earnings management* (Agustia, 2013).

Praktek manipulasi laba sangat umum di kalangan perusahaan sebagai akibat dari masalah keagenan yang serius (Healy dan Wahlen, 1999). Manajemen laba dapat terjadi antara lain karena manipulasi catatan akuntansi, kelalaian yang disengaja atau kesalahan yang disengaja prinsip akuntansi (Bukit dan Iskandar, 2009). Selain itu, praktik manajemen yang dilakukan oleh manajemen dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak akurat dan menyesatkan. Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan

keputusan dalam pelaporan keuangan dan penstrukturan transaksi untuk mengubah laporan keuangan yang salah satunya untuk menyesatkan para pemangku kepentingan, atau untuk mempengaruhi hasil kontrakal yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi antara pemangku kekuasaan dengan manajemen karena informasi yang diberikan manajemen kepada pemangku kepentingan berbeda dengan yang seharusnya.

Manajemen termotivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui hadiah langsung seperti gaji dan bonus atau promosi di masa depan. Imbalan ini diberikan kepada manajer berdasarkan kinerja yang sudah dilakukan selama periode tertentu. Jika insentif yang diberikan kepada manajemen didasarkan pada kinerja keuangan perusahaan, manajer mungkin tergoda untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Di sisi lain manajemen akan berusaha membuat para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terkesan atas kinerja perusahaan yang baik melalui manajemen laba. Kebijakan manajemen atas melaporkan laba dan pengaruhnya terhadap memimpin kompensasi manajemen untuk masalah keagenan potensial.

Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akrual. Basis akrual membuat perusahaan dapat menunda pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode berikutnya. Selain itu perusahaan dapat mengakui pendapatan pada periode tertentu walaupun kas akan baru diterima pada periode selanjutnya. Hal ini

mengakibatkan munculnya akun akrual pada laporan keuangan, seperti piutang, pendapatan diterima dimuka, hutang dan lain-lain.

Konsep akrual terdiri dari *discretionary accrual* dan *non-discretionary accrual*. Komponen dari *discretionary accrual* adalah komponen yang bisa dimanipulasi oleh manajemen untuk tujuan tertentu. Jika semakin besar nilai dari *discretionary accrual* perusahaan, maka manajemen laba di perusahaan akan semakin tinggi.

Dalam Scoot (2003) terdapat beberapa pola manajer dalam melakukan manajemen laba :

1. *Taking a bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.

2. *Income minimization*

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3. *Income maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

4. *Income smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Akibat dari praktik manajemen laba, angka akuntansi yang dilaporkan perusahaan tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang kemudian akan mengakibatkan keputusan yang tidak maksimal dari perusahaan yang kemudian akan berdampak negatif kepada perkembangan perusahaan. Investor biasanya menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan ekonomi yang tercermin dalam harga saham. Alhasil jika informasi keuangan yang diberikan kepada publik digunakan oleh investor, maka investor yang menggunakan informasi tersebut akan tersesat karena informasi yang salah akibat dari praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.

Scott (2003) juga terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer berperilaku oportunitis, yaitu motivasi kontraktual lainnya, politik, pajak, perubahan CEO, IPO, dan mengkomunikasikan informasi ke investor.

1. Motivasi kontraktual lainnya

Perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi. Manajemen

melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian utangnya agar meloloskan perusahaan dari kesulitan keuangan

2. Motivasi politik

Perusahaan besar cenderung untuk melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah

3. Motivasi pajak

Perusahaan cenderung ingin membayarkan pajak lebih rendah dibandingkan sesungguhnya. Namun peraturan perpajakan dari pemerintah memaksa perusahaan melakukan penghitungan dengan metode yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pajak seharusnya tidak memainkan peran penting dalam melakukan pengambilan keputusan melakukan manajemen laba.

4. Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

5. *Initial Public Offering* (IPO)

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki harga pasar sehingga perlu menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Hal ini menyebabkan manajer perusahaan yang *go public* melakukan

manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya dengan cara menaikkan laba perusahaan.

6. Pentingnya memberi informasi kepada investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

2.1.3 *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan Peraturan Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2006 terdapat 5 prinsip agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, antara lain :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Selain itu, perusahaan harus memenuhi syarat dalam hal organ perusahaan agar terlaksananya mekanisme *good corporate governance*.

Organ-organ yang dimaksud adalah:

1. Rapat umum pemegang saham

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang dewan komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota.

2. Dewan komisaris dan direksi

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*twoboard system*) yaitu dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

3. Dewan komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan peraturan *good corporate governance*.

Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b) Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

4. Komite audit

- a) Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun

eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;

- b) Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris;
- c) Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

5. Komite nominasi dan remunerasi

- a) Komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewan komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi serta sistem remunasinya;

- b) Komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewan komisaris mempersiapkan calon anggota dewan komisaris dan direksi dan mengusulkan besaran remunasinya. Dewan komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan anggaran dasar;
 - c) Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komite nominasi dan remunerasi diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan;
 - d) Keberadaan komite nominasi dan remunerasi serta tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS.
6. Komite Kebijakan Risiko
- a) Komite kebijakan risiko bertugas membantu dewan komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan;

- b) Anggota komite kebijakan risiko terdiri dari anggota dewan komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.
7. Komite kebijakan corporate governance
- a) Komite kebijakan *corporate governance* bertugas membantu dewan komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang berhubungan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
 - b) Anggota komite kebijakan corporate governance terdiri dari anggota dewan komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan;
 - c) Bila dipandang perlu, komite kebijakan *corporate governance*

2.1.4 Surplus Free Cash Flow

Surplus free cash flow adalah arus kas bebas lebih yang ada di perusahaan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham tetapi tidak digunakan untuk modal kerja atau investasi pada aset tetap. *Surplus free cash flow* yang ada di perusahaan seharusnya dapat digunakan untuk pembayaran hutang atau pembayaran deviden kepada pemegang saham. Jensen (1986) dalam Bukit dan Iskandar (2009) menyatakan bahwa jika arus kas bebas dalam sebuah perusahaan tidak dioperasikan secara

maksimal dalam memaksimalkan kepentingan pemegang saham, maka dapat menimbulkan masalah keagenan. Manajer biasanya memilih untuk menginvestasikan dananya dalam proyek yang tidak menguntungkan (sesuai kepentingan manajer). Akibat dari hal tersebut, pertumbuhan perusahaan akan menjadi rendah. Akibat dari pemilihan investasi yang tidak menguntungkan yang dilakukan oleh manajer yang menyebabkan pertumbuhan perusahaan menjadi rendah, maka manajer melakukan manajemen laba guna menyembunyikan efek negatif dari pengambilan keputusan dalam penggunaan surplus arus kas bebas yang ada di perusahaan.

Bukit dan Iskandar (2009) meneliti hubungan *surplus free cash flow* terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian menyebutkan bahwa *surplus free cash flow* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

2.1.5 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (UU No 40 tahun 2007). Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) anggota dewan komisaris sebuah perusahaan dipilih. Mereka dipilih untuk periode tertentu

dan jika memungkinkan mereka bisa diangkat kembali di periode selanjutnya. Dewan komisaris tidak boleh ikut serta dalam mengambil keputusan operasional dan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada RUPS (KNKG, 2006). Dewan komisaris hanya bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern (Mulyadi, 2002).

Undang - Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota dewan komisaris.

2.1.6 Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan keputusan Bapepam Nomor : KEP-643/BL/2012 komisaris independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham mayoritas serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang memiliki tingkat independensi yang lebih tinggi yang berfungsi mengawasi manajemen agar mekanisme *good corporate governance* perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik.

Menurut Kom dan Nofsinger dalam Anggana (2013) dewan komisaris independen adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mempekerjakan, mengevaluasi dan memecat para manajer puncak, mendapat kepercayaan dalam kunci pengambilan keputusan operasi dan finansial perusahaan, memberi nasihat kepada pihak manajemen dan memberikan selalu informasi tentang kondisi perusahaan kepada para pemegang saham.

Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur di dalam peraturan BEJ Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004. Melalui peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan publik yang terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris independen yang jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Kriteria mengenai komisaris independen menurut lampiran peraturan BEJ Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 sebagai berikut :

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

Dewan komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan tingkat independensi dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen ini diharapkan bisa bersikap netral, karena tidak ada pengaruh dari manajemen, selain itu dengan adanya kehadiran dewan komisaris independen adalah agar dapat mendukung dewan komisaris dalam menciptakan *good corporate governance* di dalam perusahaan. Dengan demikian semakin besar komposisi dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh stakeholder semakin objektif (Rupley *et al.* 2012).

2.1.7 Ukuran Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan perusahaan agar dapat terciptanya *good corporate governance* di perusahaan. Komite audit mempunyai andil yang sangat penting dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan Saleh *et al.* tahun 2007 besarnya jumlah keanggotaan komite audit berpengaruh negatif pada praktik manajemen laba di suatu perusahaan. Dengan kata lain, semakin

banyak jumlah anggota komite audit, maka angka praktik manajemen laba di suatu perusahaan akan semakin menurun.

Melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No: KEP-643/BL/2012, Bapepam mensyaratkan pembentukan komite audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari 3 (tiga) rang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Selain itu komite audit diketuai oleh komisaris independen.

2.1.8 Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite audit juga wajib mengadakan rapat komite audit yang berfungsi sebagai media komunikasi antara para anggota komite audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan di perusahaan agar *good corporate governance* telah diterapkan dengan tepat. Hal ini juga dipertegas oleh berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No : KEP-643/BL/2012 yang menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Komite audit yang lebih sering mengadakan rapat atau pertemuan serta pengawasan secara langsung terbukti dapat mengurangi tingkat manajemen laba dalam perusahaan (Vafeas, 2005).

2.1.9 Jumlah *Finance Expert* Komite Audit

Salah satu tugas dari komite audit adalah mengawasi proses penyusunan dan pelaporan keuangan, dalam hal ini faktor keahlian keuangan (*finance experts*) komite audit sangat diperlukan agar dapat membantu dewan komisaris dalam melaksanakan *good corporate governance* di dalam perusahaan.

Dalam susunan keanggotaan komite audit, harus ada minimal salah seorang dari komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Hal ini berfungsi agar dalam melakukan tugasnya, komite audit dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik agar di perusahaannya dapat tercipta *good corporate governance* diperusahaan. Praktik manajemen laba di suatu perusahaan akan berkurang jika jumlah anggota komite audit memiliki lebih banyak *finance expert* daripada anggota komite audit yang memiliki lebih sedikit *finance experts* (Saleh *et al.* 2007).

Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No : KEP-643/BL/2012 menjelaskan lebih rinci tentang aturan-aturan yang harus dimiliki oleh komite audit terkait hal ini. Beberapa syarat untuk menjadi anggota komite audit, yaitu:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik

2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya
3. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Xie *et al.* (2003) meneliti tentang hubungan *corporate governance* dan manajemen laba. Xie *et al.* berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

Pada penelitian Chung *et al.* (2005) yang meneliti hubungan antara surplus arus kas bebas dan manajemen laba bahwa *surplus free cash flow* berpengaruh positif dengan manajemen laba.. Jadi semakin tingginya surplus arus kas bebas di perusahaan, maka manajemen laba di perusahaan akan semakin tinggi.

Rahman dan Ali (2006) meneliti tentang dewan komisaris, komite audit dan budaya dengan manajemen laba. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada manajemen laba, frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba, jumlah *finance experts* anggota komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba.

Lin et. Al. (2006) meneliti tentang pengaruh dari kinerja komite audit terhadap manajemen laba. Hasilnya adalah ukuran komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba.

Iskandar dan Rahmat (2007) meneliti tentang manajemen laba dengan komite audit sebagai variabel bebasnya. Hasilnya adalah ukuran komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba, frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, pengetahuan anggota komite audit tentang keuangan (*finance experts*) berpengaruh negatif pada manajemen laba.

Ebrahim Ahmed (2007) meneliti tentang aktivitas dewan komisaris dan manajemen laba. Hasilnya adalah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada manajemen laba.

Bukit dan Iskandar (2009) meneliti tentang pengaruh antara *surplus free cash flow*, dan komite audit terhadap manajemen laba. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa manajemen laba muncul ketika perusahaan memiliki *surplus free cash flow* yang tinggi.

Prastiti dan Meiranto (2013) yang meneliti tentang pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif pada manajemen laba, dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada manajemen laba. Sehingga dengan pengawasan yang semakin ketat melalui dewan komisaris, manajemen laba di perusahaan akan semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2014) tentang pengaruh komisaris independen, independensi komite audit, ukuran dan jumlah pertemuan komite audit terhadap manajemen laba menyatakan bahwa jumlah kehadiran rapat anggota komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba. Jadi dengan pengawasan yang lebih ketat melalui mekanisme *good corporate governance* di perusahaan, maka manajemen laba di perusahaan akan semakin kecil

Penelitian yang berkaitan dengan *surplus free cash flow*, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, jumlah anggota komite audit, frekuensi rapat komite audit dan jumlah *finance expert* dalam keanggotaan komite audit terhadap manajemen laba diatas dapat dipersingkat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITI	VARIABEL	ALAT ANALISIS	HASIL
1.	Xie <i>et al.</i> (2003)	Proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat komite audit, manajemen laba.	Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif pada manajemen laba • Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada manajemen laba • Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba
2.	Chung <i>et al.</i> (2005)	<i>Surplus free cash flow</i> , manajemen laba.	Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Surplus free cash flow</i> berpengaruh positif dengan manajemen laba
3.	Rahman dan Ali (2006)	Proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat komite audit, <i>finance experts</i> komite audit, manajemen laba.	Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada manajemen laba • Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba. • Jumlah <i>finance experts</i> anggota komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba.
4.	Lin <i>et al.</i> (2006)	Ukuran komite audit, manajemen laba.	Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
5.	Saleh <i>et al.</i> (2007)	Ukuran komite audit, Frekuensi rapat komite audit, <i>finance expert</i> komite audit, manajemen laba.	Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba • Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba • Pengetahuan anggota komite audit tentang keuangan (<i>finance experts</i>) berpengaruh negatif

				pada manajemen laba.
6.	Ebrahim (2007)	Dewan komisaris independen, manajemen laba.	Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada manajemen laba
7.	Bukit dan Iskandar, (2009)	<i>Surplus free cash flow</i> , manajemen laba.	Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen laba muncul ketika perusahaan memiliki <i>surplus free cash flow</i> yang tinggi.
8.	Prastiti dan Meiranto (2013)	Ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, manajemen laba.	Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif pada manajemen laba • Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif pada manajemen laba
9.	Prabowo, (2014)	Jumlah rapat komite audit, manajemen laba.	Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rapat komite audit berpengaruh pada manajemen laba

2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi tentang pengaruh *surplus free cash flow*, dan mekanisme *good corporate governance* yang diproksikan dalam ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, jumlah komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan jumlah *finance experts* komite audit terhadap manajemen laba.

Semakin tingginya *surplus free cash flow* yang ada di perusahaan, maka timbul kecenderungan manajemen dalam melakukan manajemen laba, karena terdapat perbedaan kepentingan yang dimiliki antara manajemen yang disini bertindak sebagai *agent* dan pemangku kepentingan yang disini bertindak sebagai *principal*. Penelitian yang dilakukan Bukit dan Iskandar tahun 2009, yang meneliti mengenai pengaruh *surplus free cash flow* terhadap manajemen laba mendapatkan bahwa *surplus free cash flow* memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Selain itu Chung *et al.* (2005) berpendapat bahwa jika perusahaan dengan surplus arus kas yang tinggi, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut akan mengalami manajemen laba.

Prastiti dan Meiranto (2013) menyatakan bahwa dengan jumlah dewan komisaris yang semakin banyak, maka praktik manajemen laba akan semakin menurun atau dengan kata lain, jumlah dewan komisaris perusahaan akan berpengaruh negatif pada manajemen laba karena seiring dengan meningkatnya pengawasan dari dewan komisaris terhadap kinerja manajemen.

Manajemen selaku *agent* memiliki peran yang besar dalam praktik manajemen laba di suatu perusahaan, sementara itu pemilik perusahaan selaku *principal* tidak ingin ada terjadinya praktik manajemen laba yang menyebabkan asimetri informasi. Maka untuk mencegah praktik manajemen laba, harus ada pengawasan dari pihak eksternal. Menambah dewan komisaris independen menjadi salah satu cara untuk mencegah praktik manajemen laba di suatu perusahaan. Kehadiran dewan komisaris independen sangat mempengaruhi praktik manajemen laba di suatu perusahaan. Ebrahim (2007) menyatakan dalam penelitiannya tentang manajemen laba bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada manajemen laba, karena dengan adanya pihak yang bersifat independen maka praktik kecurangan dapat ditekan melalui jumlah komisaris independen yang lebih besar.

Penelitian yang dilakukan Saleh *et al.* (2007) tentang hubungan komite audit dengan manajemen laba. Saleh *et al.* berpendapat bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan jumlah anggota komite audit yang lebih besar, maka praktik manajemen laba di suatu perusahaan akan semakin kecil. Hal ini berkaitan dengan teori agensi karena komite audit sebagai pengawas yang diberi perintah oleh *principal* untuk mengawasi manajemen (*agent*) agar mencegah tindakan manajemen laba.

Rapat yang dilakukan antar anggota komite audit merupakan salah satu cara dalam pencegahan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh

manajemen. Melalui rapat komite audit, aktivitas manajemen dapat terus diawasi karena praktik manajemen laba di perusahaan bisa terjadi karena kurangnya pengawasan kepada pihak manajemen. Semakin sering dilaksanakan rapat anggota komite audit di suatu perusahaan menurut Rahman dan Ali (2006) menyatakan bahwa praktik manajemen laba di suatu perusahaan akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan monitoring dari komite audit terhadap aktivitas manajemen perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Rahmat di tahun 2007, mereka berpendapat bahwa frekuensi rapat komite audit akan berpengaruh negatif pada manajemen laba.

Adanya salah satu dari anggota komite audit yang diharuskan ahli dalam bidang keuangan sudah ditentukan dalam keputusan Bapepam Nomor : KEP-643/BL/2012 menyatakan bahwa salah seorang dari komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Hal ini ditujukan agar komite audit dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. Dalam Iskandar dan Rahmat (2007) dan Rahman dan Ali (2006) menyatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang ahli dalam bidang keuangan (*finance experts*) maka praktik manajemen laba di perusahaan akan semakin kecil atau dengan kata lain jumlah *finance experts* anggota komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba.

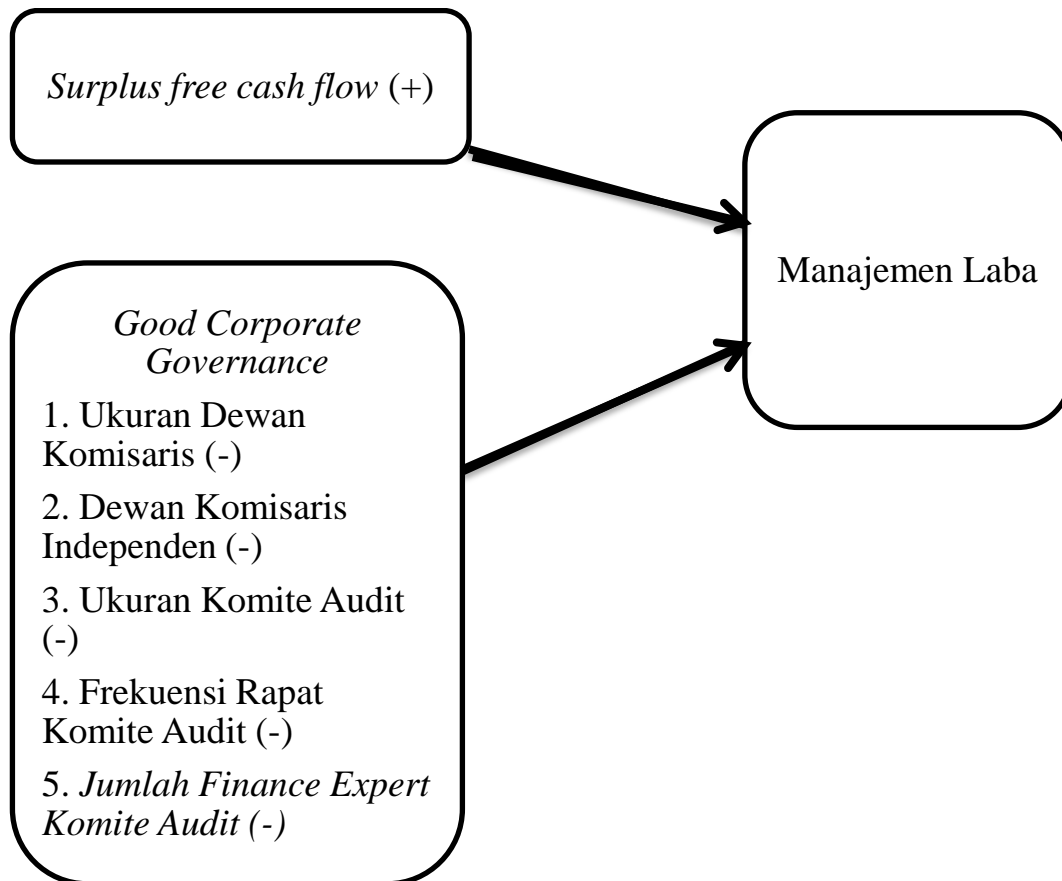
Jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang keahlian di bidang keuangan (*finance experts*) menjadi salah satu

pencegah timbulnya praktik manajemen laba di suatu perusahaan, karena dengan adanya anggota komite audit dengan latar belakang *finance experts* ini maka praktik manajemen laba yang dilakukan manajemen dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan untuk pemangku kepentingan perusahaan. Hal ini berhubungan dengan teori agensi karena manajemen melakukan tindakan manipulasi laba pada laporan keuangan sehingga perlu adanya pengawasan dari pihak *principal* agar tidak terjadi tindakan seperti itu.

Berdasarkan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan juga penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran teoritis yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian. Dalam sub-bab ini akan dibagi menjadi 2 sub bab yaitu *surplus free cash flow* dan mekanisme *good corporate governance* yang diproksikan dalam ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, jumlah komite audit, frekuensi

rapat komite audit, dan jumlah *finance experts* komite audit. Berikut akan dijelaskan mengenai pengembangan hipotesis dalam penelitian ini.

2.4.1 *Surplus Free Cash Flow*

Bukit dan Iskandar (2009) menyatakan salah satu penyebab muncul konflik keagenan yang akan menyebabkan timbulnya *agency cost* adalah *surplus free cash flow*. *Surplus free cash flow* merupakan kas lebih perusahaan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham yang tidak digunakan untuk modal kerja atau investasi pada aset tetap. Arus kas bebas dapat menimbulkan perbedaan kepentingan ketika principal menginginkan sisa dana tersebut dibagikan untuk meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan manajer berkeinginan arus kas bebas digunakan untuk memperbesar perusahaan melebihi ukuran optimal.

Jika arus kas bebas dalam sebuah perusahaan tidak dioperasikan dalam memaksimalkan kepentingan pemegang saham, maka dapat menimbulkan masalah keagenan karena manajer dapat memilih untuk berinvestasi dalam proyek yang tidak menguntungkan untuk kepentingan mereka sendiri sehingga dapat mengakibatkan rendahnya pertumbuhan perusahaan (Bukit dan Iskandar, 2009). Akibat dari rendahnya pertumbuhan perusahaan, manajemen melakukan manajemen laba untuk membiaskan efek dari penggunaan *surplus free cash flow* sehingga kinerja manajer selalu terlihat baik meskipun manajer menggunakan surplus free cash flow yang ada di perusahaan sesuai dengan keinginannya.

Dalam penelitian Bukit dan Iskandar (2009) yang meneliti tentang hubungan *surplus free cash flow* dengan manajemen laba berpendapat bahwa semakin tinggi nilai *surplus free cash flow* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba. Selain itu, Chung *et al.* (2005) juga berpendapat yang sama yakni *surplus free cash flow* berpengaruh positif dengan manajemen laba suatu perusahaan. Berdasarkan argumen di atas, peneliti berhipotesis :

Hipotesis 1 : Surplus arus kas bebas berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.4.2 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan salah satu organ dalam pelaksanaan mekanisme *good corporate governance* di perusahaan. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kinerja manajer agar manajer dapat melakukan tugasnya dengan baik, dengan semakin banyak anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan, maka diharapkan pengawasan terhadap kinerja manajer akan semakin ketat, sehingga dapat menurunkan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer.

Prastiti dan Meiranto (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan dengan manajemen laba. Dengan demikian penelitian ini menguji pengaruh ukuran dewan komisaris pada manajemen laba. Berdasarkan argumen di atas, peneliti berhipotesis :

Hipotesis 2 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.3 Dewan Komisaris Independen

Untuk mencapai *good corporate governance*, dewan direksi harus selalu mengawasi perilaku manajer. Dewan komisaris independen atau eksternal didatangkan untuk melakukan pemantauan dan untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Dapat dikatakan bahwa untuk memiliki peran yang efektif, dewan komisaris harus terdiri dari sejumlah besar komisaris independen. Dewan komisaris independen yang berada di perusahaan sangat mempengaruhi praktik manajemen laba di suatu perusahaan.

Ebrahim (2007) menyatakan dalam penelitiannya tentang manajemen laba bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada manajemen laba. Dengan adanya dewan komisaris independen, maka praktik kecurangan dapat ditekan melalui komposisi komisaris independen yang lebih besar. Xie *et al.* (2003) menyatakan hal yang serupa bahwa dengan semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka praktik manajemen laba di perusahaan tersebut akan semakin kecil. Berdasarkan argumen di atas, peneliti berhipotesis :

Hipotesis 3 : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.4 Ukuran Komite Audit

Peran dari komite audit sangat diperlukan di dalam perusahaan dalam hal pengawasan. Tugas komite mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas. Komite audit sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya pengawasan dari komite audit, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih informative dan berkualitas

Dalam penelitian yang dilakukan Iskandar dan Rahmat di tahun 2007 tentang hubungan komite audit dengan manajemen laba. Iskandar dan Rahmat berpendapat bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan jumlah anggota komite audit yang lebih besar, maka praktik manajemen laba di suatu perusahaan akan semakin kecil. Berdasarkan argumen di atas, peneliti berhipotesis :

Hipotesis 4 : Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.4.5 Frekuensi Rapat Komite Audit

Kegiatan pengawasan dari komite audit terhadap aktivitas manajemen perusahaan sangat membantu menekan adanya manajemen laba. Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan komite audit adalah dengan melaksanakan rapat anggota komite audit. Semakin tinggi frekuensi rapat yang diadakan komite audit, maka akan meningkatkan efektivitas

komite audit dalam mengawasi manajemen (agen) agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri.

Menurut Rahman dan Ali pada penelitian yang dilakukan di tahun 2006 menyatakan bahwa manajemen laba di suatu perusahaan akan semakin kecil. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Rahmat di tahun 2007 dan Xie et al (2003), yang berpendapat bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba. Berdasarkan argumen di atas, peneliti berhipotesis :

Hipotesis 5 : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.6 Jumlah *Finance Experts* Komite Audit

Jumlah *finance expert* komite audit juga dapat meningkatkan fungsi pengawasan pemilik perusahaan (prinsipal) terhadap pihak manajemen (agen). Dengan semakin banyak jumlah *finance expert* komite audit maka pelaporan keuangan oleh manajemen akan lebih berkualitas. Hal ini disebabkan karena anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan akan lebih mudah dalam mendeteksi adanya manipulasi laba yang dapat menguntungkan manajemen saja.

Dalam Iskandar dan Rahmat (2007) menyatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang keahlian dalam bidang keuangan (*finance experts*) maka manajemen laba di perusahaan akan semakin kecil. Selain itu dan Rahman dan Ali (2006) menyatakan bahwa dengan jumlah *finance experts* anggota komite audit yang semakin

tinggi maka akan berpengaruh negatif pada manajemen laba atau dengan kata lain akan menurunkan praktik manajemen laba di suatu perusahaan.

Berdasarkan argumen di atas, peneliti berhipotesis :

Hipotesis 6 : Jumlah *finance expert* komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai definisi dan operasional variabel yang digunakan pada penelitian, populasi dan sampel data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel terikat yaitu manajemen laba, variabel bebas yaitu *surplus free cash flow*, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat anggota komite audit, dan jumlah *finance experts* komite audit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang artinya data yang dikumpulkan bersifat angka-angka yang diperoleh dari sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui pihak kedua atau lebih, berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam bentuk arsip.

Data-data tersebut akan diproses secara statistik dan dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menurut tempatnya termasuk tipe *library research* karena penelitian dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) dari penelitian sebelumnya.

3.1.1 Variabel Dependen

3.1.1.1 Manajemen Laba

Pada penelitian ini, manajemen laba di definisikan sebagai bentuk tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (*agent*) dengan menaikkan atau menurunkan laba yang sesungguhnya, kemudian memberikan informasi pelaporan keuangan yang salah sehingga dapat mengganggu dan membahayakan perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini manajemen laba diukur dengan *proxy discretionary accruals* (DA) yang kemudian diabsolutkan. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi manajemen laba yang meningkatkan atau menurunkan laba (Chen *et al*, dalam Mardadi dan Sanjaja 2010). Pengukuran *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba menggunakan model Jones (1991) yang dimodifikasi oleh (Dechow *et al*.1995).

- a) Mengukur total accrual dengan menggunakan model *Modified Jones*.

$$\text{Total Accrual (TAC)} = \text{NI} - \text{CFO}$$

Di mana :

NI : laba bersih setelah pajak (*net income*)

CFO : arus kas operasi (*cash flow from operating*)

- b) Menghitung nilai *accruals* yang diestimasi dengan persamaan regresi.

$$\text{TACt} / \text{At-1} = \alpha_1(1 / \text{At-1}) + \alpha_2((\Delta \text{REVt}) / \text{At-1}) + \alpha_3(\text{PPEt} / \text{At-1}) + e$$

Di mana :

TACt : total accruals perusahaan i pada periode t

At-1 : total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

REVt : perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

REct : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPEt : aktiva tetap (gross property plant and equipment) perusahaan tahun t

c) Menghitung *non-discretionary accruals model* (NDA) adalah sebagai berikut:

$$\text{NDA}_t = \alpha_1(1 / \text{At-1}) + \alpha_2((\Delta \text{REVt} - \Delta \text{REct}) / \text{At-1}) + \alpha_3(\text{PPEt} / \text{At-1})$$

Di mana :

NDA_t : *non-discretionary accruals* pada tahun t

α : *fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total accruals

d) Menghitung *discretionary accruals* adalah sebagai berikut :

$$\text{DACt} : (\text{TACt} / \text{At-1}) - \text{NDA}_t$$

Di mana :

DAC_t : *discretionary accruals* perusahaan i pada periode t

e) Menghitung *absoute discretionary accruals* adalah sebagai berikut

$$ABSDAC : |DAC_t|$$

Di mana :

$ABSDAC$: Nilai *absoute discretionary accruals*

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *surplus free cash flow*, mekanisme *good corporate governance* yang diproksikan ke ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan jumlah *finance experts* komite audit.

3.1.2.1 Surplus Free Cash Flow

Surplus free cash flow adalah suatu keadaan dimana arus kas bebas perusahaan berada diatas median dan *price to book ratio* perusahaan berada dibawah median pada tahun tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi adanya masalah keagenan *surplus free cash flow* dengan menggunakan dua proksi, arus kas bebas (Lehn dan Poulsen, 1989) dan prospek pertumbuhan perusahaan ditunjukkan oleh *price to book ratio* (Holthausen dan Larcker; Skinner dalam Bukit dan Iskandar, 2009). Perusahaan dikategorikan memiliki potensi masalah keagenan *surplus free cash flow* ketika arus kas bebas perusahaan tersebut di atas median dan *price to book ratio* di bawah median (Chung *et al.* 2005). Perusahaan yang

memiliki masalah *surplus free cash flow* akan diberikan berkode 1 ketika arus kas bebas berada di atas median untuk setahun dan *price to book ratio* tahunan di bawah median dan diluar keadaan tersebut, akan diberi kode 0.

Empat kondisi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan sehubungan dengan arus kas bebas, yakni arus kas bebas tinggi tetapi pertumbuhan rendah, aliran kas bebas yang tinggi dan pertumbuhan yang tinggi, arus kas bebas rendah dan pertumbuhan yang rendah, dan aliran kas bebas rendah tetapi pertumbuhan yang tinggi. Situasi di mana timbul masalah keagenan yakni ketika perusahaan memiliki arus kas bebas tinggi tetapi mengalami pertumbuhan yang rendah, tetapi tiga kondisi lain kemungkinan besar tidak akan menimbulkan masalah *agency*.

Surplus free cash flow adalah variabel *dummy* ditetapkan sama dengan 1 jika perusahaan memiliki arus kas bebas tinggi (yaitu bebas arus kas berada di atas median sampel untuk tahun yang bersangkutan) namun pertumbuhan rendah (yaitu *price to book ratio* di bawah median sampel untuk tahun yang bersangkutan). Sisanya jika tidak memenuhi kriteria di atas akan diberi kode 0. (Bukit dan Iskandar, 2009)

Rumus untuk menghitung arus kas bebas adalah (Chung *et al.* 2005).

$$FCFit = (INCit - TAXit - INTEXPit - DIVit)/TA-1$$

Keterangan:

FCFit = Arus kas bebas

INCit = Laba operasi sebelum penyusutan perusahaan i
tahun t

TAXit	= Total pajak perusahaan i tahun t
INTEXPit	= Beban bunga perusahaan i pada tahun t
DIVit	= Dividen perusahaan i pada tahun t
TA-1	= Total Aset tahun sebelumnya

Kesempatan pertumbuhan diproksikan dengan *price to book ratio* (Chung *et al.* 2005). *Price to book ratio* yang tinggi mengindikasikan bahwa investor mempersepsikan perusahaan memiliki kesempatan pertumbuhan yang tinggi. Semakin besar rasio ini, semakin besar nilai kesempatan pertumbuhan (Rahman & Oktaviana, 2010).

3.1.2.2 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah total jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan baik yang berasal dari luar maupun dalam perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris yang ada di suatu perusahaan (Sukeecheep *et al.* 2013). Peneliti mendapat informasi tentang ukuran dewan komisaris dengan cara menjumlah anggota komisaris yang ada di perusahaan, baik itu dari dalam maupun luar perusahaan (independen).

3.1.2.3 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris pada penelitian ini dilihat dari perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah total seluruh dewan komisaris yang ada di suatu perusahaan (Siregar dan Utama, 2005). Sehingga pengertian dari dewan komisari independen pada penelitian ini adalah komposisi antara jumlah dewan komisaris independen dengan total

jumlah dewan komisaris yang ada di suatu perusahaan. Dewan komisaris independen diukur dengan membagi antara jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

3.1.2.4 Ukuran Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas (Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No : KEP-643/BL/2012). Peneliti mendapatkan nilai dari jumlah komite audit dengan menjumlahkan seluruh anggota komite audit yang ada di suatu perusahaan (Saleh *et al.*, 2007).

3.1.2.5 Frekuensi Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat komite audit adalah jumlah total aktivitas rapat yang dilaksanakan oleh komite audit suatu perusahaan dalam satu periode. Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No : KEP-643/BL/2012 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Untuk mendapatkan nilai mengenai frekuensi rapat komite audit, peneliti menghitungnya dengan cara menjumlahkan total seluruh rapat yang diselenggarakan komite audit perusahaan dalam satu tahun (Saleh *et al.*, 2007).

3.1.2.6 Jumlah *Finance Expert* Komite Audit

Jumlah *finance expert* komite audit adalah jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan. Faktor *finance expert* seorang auditor dinyatakan dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No : KEP-643/BL/2012 yang menyatakan bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan informasi tentang jumlah auditor yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dengan cara menjumlahkan auditor dalam suatu perusahaan yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan (Saleh *et al.*, 2007).

Tabel 3.1
Ringkasan Variabel Penelitian

No.	Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Manajemen laba (Variabel Terikat)	Sebagai bentuk tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (<i>agent</i>) dengan menaikkan atau menurunkan laba yang sesungguhnya, yang memberikan informasi laporan keuangan yang salah sehingga dapat mengganggu dan membahayakan perusahaan dalam jangka panjang.	DACT : (TACT / At-1) – NDA _t
2	<i>Surplus free cash flow</i> (Variabel	Suatu keadaan dimana arus kas bebas perusahaan diatas rata-rata dan <i>price to book</i>	Bernilai 1 ketika arus kas bebas perusahaan

	Bebas)	<i>ratio</i> perusahaan dibawah rata-rata pada tahun tersebut.	tinggi dan perusahaan memiliki pertumbuhan yang rendah.
3	Ukuran dewan komisaris (Variabel Bebas)	Total jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan baik yang berasal dari luar maupun dalam perusahaan.	Jumlah seluruh dewan komisaris yang ada di perusahaan.
4	Dewan komisari independen (Variabel Bebas)	Komposisi antara jumlah dewan komisaris independen dengan total jumlah dewan komisaris yang ada di suatu perusahaan.	Proporsi antara jumlah dewan komisaris independen dengan total seluruh dewan komisaris yang ada.
5	Ukuran komite audit	Jumlah seluruh anggota komite audit yang berada pada suatu perusahaan	Jumlah anggota komite audit di perusahaan.
6	Frekuensi rapat komite audit	Jumlah seluruh aktivitas rapat yang dilaksanakan oleh komite audit suatu perusahaan dalam satu periode	Jumlah rapat anggota komite audit di perusahaan dalam satu periode.
7	Jumlah <i>finance expert</i> komite audit	Jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan.	Jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu penelitian (2012-2013).

3.2.2 Sampel Penelitian

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu :

1. Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2013
2. Perusahaan manufaktur yang memiliki data laporan keuangan selama periode 2012-2013
3. Perusahaan manufaktur yang memiliki informasi yang diperlukan di dalam penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperlukan untuk penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan *indonesia capital marker directory* (ICMD) perusahaan manufaktur tercatat periode 2012-2013 yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). Data-data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu

www.idx.co.id dan Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Diponegoro.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian menggunakan metode dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Diponegoro atau dapat diakses melalui internet www.idx.go.id. Berdasarkan sumber data tersebut maka diperoleh data kuantitatif berupa data laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan *go public*.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi jumlah sample, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan deviasi standar (Ghozali, 2011)

Nilai minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Deviasi standar digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi baik variabel dependen maupun variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis Grafik

Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Menurut (Ghozali, 2011), dasar pengambilan keputusannya adalah :

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Statistik

Uji normalitas dianjurkan untuk menggunakan uji statistik di samping uji grafik. Hal itu disebabkan uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati. Secara visual distribusi kelihatan normal, padahal secara statistik bias sebaliknya (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan uji statistik *non-parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S)*.

Pedoman pengambilan keputusan :

- a. Nilai Sig atau signifikan atau nilai probabilitas < 0.05 maka distribusi adalah tidak normal.
- b. Nilai Sig atau signifikan atau nilai probabilitas > 0.05 maka distribusi adalah normal.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji *glejser*. Jika nilai signifikansi uji *glejser* $> 5\%$ maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol). Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*), yaitu :

- a) Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.
- b) Jika nilai tolerance < 0.10 dan VIF > 10 , maka dapat diartikan bahwa terjadi multikolinearitas pada penelitian tersebut.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2011). Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Salah satu prosedur uji autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson* (DW test). Langkahnya yakni dengan membandingkan nilai *Durbin-Watson* (DW) dalam tabel *Durbin Watson* (DW).

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini juga mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{ABSDAC} = \alpha_0 + \beta_1 \text{SFCF} + \beta_2 \text{UDK} + \beta_3 \text{KDKI} + \beta_4 \text{UKA} + \beta_5 \text{RAPAT} + \beta_6 \text{EXPERT} + e$$

Keterangan :

ABSDAC = *Absolute discretionary accrual*

α_0 = konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5,6}$ = koefisien variabel

SFCF = *Surplus Free Cash Flow*

UDK = Ukuran Dewan Komisaris

KDKI = Dewan Komisaris Independen

UKA	= Ukuran Komite Audit
RAPAT	= Rapat Komite Audit
EXPERT	= <i>Finance experts</i> Komite Audit
e	= error

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya menyatakan seberapa baik suatu model untuk menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1
- Bila $R^2 = 1$ maka terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- Bila $R^2 = 0$ maka tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai

pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, variabel independen tidak secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Parsial (t test)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual menerangkan variasi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen